

ISLAM DAN PENDIDIKAN HUMANIS DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL

Sagaf S. Pettalongi
STAIN Datokarama Palu Sulawesi Tengah
email: bakungs67@yahoo.com

Abstrak: Masyarakat Indonesia memiliki kemajemukan dan keragaman sosial, baik suku, budaya, adat istiadat, maupun agama. Keragaman ini merupakan potensi besar dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi kerawanan konflik sosial. Setidaknya ada dua hal yang dapat dipakai dalam menengahi dan mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia. Pertama, peran Islam sebagai agama mayoritas yang damai. Islam dengan penganut mayoritas memiliki kontribusi yang besar dalam mencegah terjadinya konflik sosial karena Islam merupakan agama perdamaian. Islam harus menjadi *rahmatan lil alamin*. Kedua peran pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis menekankan pemanusiaan manusia. Pendidikan humanis memberi keseimbangan dalam kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Untuk mewujudkan konsep pendidikan yang humanis dalam resolusi konflik sosial diperlukan peran dan implementasi pendidikan multikultural dan pendidikan karakter. Keduanya diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di dalam masyarakat sebagai efek dari kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Islam, pendidikan humanis, konflik sosial, multikultural dan karakter*

ISLAM DAN HUMANISTIC EDUCATION IN SOCIAL CONFLICT RESOLUTION

Abstract: Indonesia is a country with ethnic, culture, custom, and religion pluralism and diversity. This diversity is a great potential in the nation development as well as a potential for social conflicts. There are at least two things that can be used to mediate and prevent social conflicts in Indonesia. First, the role of Islam as the religion of the majority for peace has a great contribution to prevent social conflicts as Islam is a religion of peace. Islam should really be the mercy and kindness for the universe. The second is the role of humanistic education which emphasizes humanizing humans. Humanistic education provides a balance in the intellectual, emotional, social and spiritual intelligence. The realization of the concept of humanistic education in social conflict resolution required the role and implementation of multicultural education and character education which can be a real solution to the conflict and disharmony occurring in the society as the effect of the Indonesian society's pluralism and diversity.

Keywords: *Islam, humanistic education, social conflict, multicultural and character education*

PENDAHULUAN

Sejak memasuki era reformasi, banyak peristiwa sosial terjadi di Indonesia yang cenderung destruktif, baik dalam bentuk konflik suku, golongan, agama maupun politik. Sebut saja konflik sosial di Ambon, Poso, Sampit, Sukabumi, dan berbagai tempat lainnya. Kalangan elemen masyarakat sepertinya dengan mudah menaruh curiga, kebencian dan permusuhan terhadap sesama anak bangsa. Padahal, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, humanis, sopan santun, ramah tamah, dan penuh toleransi.

Jika dilihat dari nilai sosial dan agama, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan penuh kedamaian sebagai refleksi dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Sebab, semua agama hakikatnya mengajarkan umatnya untuk kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan masyarakat, serta sepakat dalam menghargai perbedaan-perbedaan sebagai realitas kemajemukan yang terformulasi dalam Sumpah Pemuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Islam dalam konteks *rahmatan lil 'alamin* mengayomi adanya kemajemukan dalam

kehidupan alam dan manusia. Bahkan, Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah juga dilandasi atas kemajemukan suku, budaya, dan agama (Haekal, 1990:195). Demikian pula halnya sejarah gerakan Islam yang dibawa oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di tanah Jawa sangat menghargai budaya lokal setiap masyarakat (Taher, 2009: 30). Sejumlah realitas ini menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan keseimbangan yang pantas antara gagasan tentang pertanggungjawaban pribadi dan realitas keberagaman (El-Fadl, 2003:105). Menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk dengan tegas melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (*al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) (Q.S. 2:194; Q.S. 2:110; Q.S.7:157; Q.S.9:71). Penegasan Al-Qur'an tersebut dalam mencegah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya pada dimensi ibadah, tetapi semua sifat dan perilaku yang dapat merugikan hak-hak pribadi dan sosial seseorang, seperti penindasan dan ketidakadilan.

Peran pendidikan humanis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia menjadi sangat penting dalam memberikan pemaknaan yang mendalam terhadap basis keberagaman sebagai realitas sosial yang harus diterima oleh setiap orang Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menggariskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan (1) karakter satuan pendidikan; (2) potensi daerah; dan (3) keragaman peserta didik (Depag RI, 2003:50). Hal ini mensyaratkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan harus memperhatikan dimensi keberagaman dan kemajemukan. Artinya, keberagaman masyarakat dapat memengaruhi tenaga pendidik dalam menentukan konsep, tujuan, isi, dan pendekatan dalam mengembangkan suatu pendidikan.

Pendidikan humanis dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam satuan pendidikan maupun masyarakat perlu mengemas pola pen-

didikan multikultural dan pendidikan karakter yang mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kemajemukan masyarakat dan budaya, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Pendidikan multikultural harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini dengan mengedepankan kebersamaan dalam pluralitas di atas dasar prinsip-prinsip toleransi dan anti terhadap segala bentuk kekerasan. Sifat toleransi, hormat-menghormati, sopan santun, jujur, berlaku adil, dan tolong-menolong adalah cermin sifat dasar bangsa Indonesia yang majemuk, dan merupakan bentuk nilai-nilai karakter orang Indonesia yang mulai tereleminir dari proses pendidikan saat ini. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia sejatinya juga mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan yang mengakar pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama.

Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Islam dan pendidikan humanis dalam meresolusi konflik sosial yang sangat rentang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dengan akar budaya yang beraneka ragam. Namun, di sisi lain, keanekaragaman itu dapat menjadi nilai perekat dalam proses interaksi sosial jika dibangun di atas nilai-nilai agama yang universal serta proses pendidikan yang humanis berdasarkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Masalah akan dibahas dari aspek sosial historis Islam dan pendidikan yang memanusiakan manusia, terutama pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural dan karakter bangsa sebagai cerminan utama masyarakat Indonesia.

AKAR KONFLIK

Jika dilihat dari aspek sosial budaya dan geografis, kemajemukan Indonesia dapat dibagi dalam dua dimensi besar. Pertama, kemajemukan vertikal yang tergambar dalam struktur masyarakat yang memiliki perbedaan lapisan dan strata sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua, kemajemukan horisontal yang tergambar dari adanya kesatuan-kesatuan sosial

yang berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kedaerahan (letak geografis).

Realitas kemajemukan ini menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia sekaligus potensi konflik dalam kerawanan sosial sebab sangat rawan terjadinya pertentangan berbagai kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa peristiwa muncul dan bergejolak karena adanya pertentangan dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) sehingga dengan cepat menyebar menjadi konflik sosial yang menegangkan dan meresahkan, dan agama sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk. Dalam kajian Badan Litbang Kementerian Agama RI disebutkan bahwa berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi pada awalnya bukan konflik agama, tetapi banyak faktor-faktor sosial yang sering terkait kemudian agama dibawa sebagai faktor legitimasi sekaligus untuk menutupi akar konflik yang sebenarnya (Mudzhar, 2004:13). Oleh karena itu, isu agama menjadi sensitif untuk melakukan pembelaan diri dari kelompok-kelompok lain. Berbagai peristiwa ketika terjadi penyerangan terhadap agama atau kelompok agama tertentu, orang-orang yang menyerang biasanya berargumentasi bahwa penyerangan itu mereka lakukan demi membela agama yang dianutnya (Sopame-na, 2007:6).

Sensitivitas masyarakat majemuk dalam label agama yang bisa menjadi faktor penyebab dan akar terjadinya konflik dalam masyarakat terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, adanya klaim kebenaran mutlak (*absolute truth claims*); klaim kebenaran mutlak harus ditujukan ke dalam diri sendiri atau interen penganut agama itu sendiri, bukan dipakai dalam menilai agama lain. Kedua, adanya ketaatan buta (*blind abedience*), yaitu dengan mengesampingkan akal sehat dan sikap kritis dalam memahami ajaran agama. Ketiga, adanya tujuan akhir membenarkan apa pun dalam mencapai tujuan (*the end justifies the means*). Biasanya hal ini dikobarkan ketika menghadapi konflik antarpemeluk agama (Sewang, 2004:3-4). Faktor-faktor ini menjadikan konflik-konflik sosial yang terjadi tampak lebih permanen dan sulit untuk disele-

saikan karena menyimpan dendam yang mendalam, apalagi jika berpatokan bahwa mati dalam membela agama adalah perbuatan terpuji dan mati syahid.

Hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama RI memandang bahwa akar masalah terjadinya konflik sosial di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga hal. (1) Adanya krisis di berbagai bidang yang terjadi beberapa tahun lalu. Selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintahan, birokrasi dan militer yang selama bertahun-tahun terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antarberbagai kelompok masyarakat. (2) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusivitas dan sensitifitas kepentingan kelompok. (3) Adanya kesenjangan sosial ekonomi dan politik. Kesenjangan ini mempermudah pengikut agama tersebut dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan antarkelompok (Mudzhar, 2004:14-15).

Apapun akar masalahnya dalam suatu konflik sosial pada hakikatnya tetap merugikan semua pihak, terutama kalangan masyarakat bawah sehingga yang dibutuhkan adalah revitalisasi dan proses transformasi nilai dengan lebih mengedepankan hal-hal berikut. (1) Pemahaman fungsional agama dan perubahan pendekatan dari pendekatan misteri menjadi pendekatan yang rasional dan fungsional sehingga nuansa agama menyatu dengan kehidupan, termasuk di dalamnya transformasi nilai agama, penafsiran, dan reaktualisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar agama tetap dirasakan manfaatnya dan berfungsi dalam kehidupan. (2) Nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pencerdasan pendidikan dan pembelajaran yang humanis.

ISLAM DAN PERDAMAIAN

Konsep perdamaian dalam Islam sangat jelas dan tegas karena perkataan Islam itu sen-

diri secara etimologis berasal dari kata *aslama-yuslimu-islam* yang berarti ketundukan (*submission*), juga kedamaian atau perdamaian (*peace*) yang dapat bermakna ketundukan secara total kepada Tuhan serta perdamaian dengan sesama manusia dan juga rasa kedamaian dengan Tuhan (Najib, 2011:41-42). Islam dalam terminologi ini bermakna menghantarkan manusia pada keselamatan dan kedamaian, baik kepada Tuhan maupun sesama makhluknya. Perdamaian juga dapat bermakna norma, sebuah nilai yang bersumber pada keesaan dan universalitas Tuhan, yaitu sebuah sistem nilai dan sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat (Abegebriel, 2004:401).

Tuhan menurunkan Islam di muka bumi sebagai petunjuk yang mengarah pada kehendak Tuhan, yaitu kedamaian di bumi (El-Fadl, 2003:194), dan bukan sekadar persoalan keyakinan terhadap kitab suci, tetapi merupakan persoalan implementasi terhadap titah suci dan realisasi perintah Tuhan (Baidowi, 2006:126). Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan memerintahkan manusia agar mengusahakan dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat yang salah satunya dengan cara saling memahami dan menghargai dalam beribadah dan berkomunikasi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku (Q.S.109:60). Tidak ada paksaan dalam agama (Q.S. 2:256). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Q.S.30:22).

Universalitas nilai-nilai Islam tersebut mempertegas bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam perbedaan. Tuhan tidak menjadikan komunitas manusia dalam kondisi yang seragam, melainkan Tuhan menjadikan manusia terdiri dari beberapa suku, agama, bahasa, kultur, status sosial, dan lainnya. Dengan kondisi yang heterogen akan tercipta kehidupan yang inovatif, kreatif dan kompetitif. Allah berfirman: "Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menciptakan kalian satu umat saja. Tetapi, Allah hendak menguji kalian dengan pem-

berian-Nya itu (yakni keragaman dan heterogenitas) kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (Q.S.5:48).

Adanya pengakuan dalam Islam terhadap nabi-nabi dan agama-agama terdahulu sebelum Islam menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam meyakini dan menghargai perbedaan serta kemajemukan. Tuhan telah mengutus para nabi terdahulu juga untuk kedamaian umat manusia. Kesamaan misi para nabi ini bisa dikatakan bahwa perdamaian merupakan sebuah kode etik universal (Baidowi,2006:126). Artinya, umat Islam harus mampu hidup dalam masyarakat yang plural karena sesungguhnya kemajemukan merupakan rahmat Tuhan. Umat Islam harus selalu bersikap *Inklusive* bukan *eksklusive*. Sikap seperti inilah yang sangat diperlukan di dalam masyarakat yang majemuk (Sulastomo, 2001: 121).

Komitmen Islam tentang perbedaan dan kemajemukan telah mengajarkan manusia untuk mewujudkan perdamaian secara menyeluruh (Q.S.2:208). Konsep dasar al-Qur'an tentang perdamaian yang menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang damai dan toleran telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika Islam berkuasa di Madinah dengan memperlakukan secara baik pemeluk agama lain meskipun Nabi ketika berada di Makkah sering mendapatkan perlakuan kasar dari kaum kafir Makkah. Bahkan, Nabi Muhammad saw membuat suatu konstitusi sebagai aturan formal yang disebut Piagam Madinah, yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw yang berisi suatu perjanjian formal antara dirinya dan semua suku dan pembesar Madinah pada tahun 622 Masehi dengan tujuan menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama (Najib, 2011:47).

Kondisi sosial masyarakat Madinah yang pernah dipimpin Nabi Muhammad saw memiliki kesamaan pluralitas dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, adat istiadat dan agama. Artinya, konsep dan formulasi ajaran Islam pada masa nabi yang penuh kedamaian dan toleransi serta hidup dalam keharmonisan dalam keragaman budaya dan agama, harus

pula bisa menjadi konsep ajaran Islam yang damai dan toleran di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, baik yang berlatar belakang politik, ekonomi suku dan agama, yang kemudian mengatasnamakan Islam sesungguhnya bukan merupakan konsep dasar Islam, dan bukan merupakan ajaran Islam. Islam adalah agama perdamaian dan anti terhadap segala bentuk kekerasan serta sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan sosial masyarakat.

Hanafi (2002:140-155) mengemukakan adanya dua syarat untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya. *Pertama*, manusia harus mampu menciptakan perdamaian internal atas perdamaian dalam jiwa. Artinya, setiap orang harus menciptakan rasa aman dan rendah hati dengan tunduk kepada kitab suci. Perdamaian dalam jiwa inilah akan menjadi manifestasi keimanan, kesalehan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kedermawanan, kesabaran, dan kesederhanaan. *Kedua*, dengan perdamaian jiwa ini akan tercipta perdamaian eksternal. Artinya, perdamaian bukan hanya bertujuan untuk meneguhkan kekuatan atau kekuasaan melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, pengangguran, diskriminasi, eksploitasi, rasisme, *apartheid*, dan semacamnya merupakan sumber penghancur perdamaian. Oleh karenanya, jika ingin menciptakan sebuah perdamaian abadi, faktor-faktor pendukung penghancur perdamaian harus juga dieliminir, bahkan dihilangkan sama sekali.

Nilai-nilai universalitas Islam telah memberi rujukan yang komprehensif terhadap makna konsep perdamaian yang penuh toleransi sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya yang kemudian melahirkan suatu model tatanan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. Sebagai manifestasi perdamaian dalam konteks Islam di Indonesia, selain perlunya penegasan kembali nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, juga perlu diperkuat instrumen regulasi yang mengatur hubungan antaragama karena di Indonesia urusan agama memiliki ca-

kupan yang luas, bahkan meliputi semua sektor kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk bernegara sehingga kompetensi masing-masing perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hubungan antarnegara dan agama maupun antar sesama agama dan umat beragama. Hubungan umat beragama yang sempat kelam di beberapa daerah di Indonesia dapat ditemukan solusi terbaik untuk sebuah kehidupan yang bermartabat, berbudaya dan damai.

PENDIDIKAN YANG HUMANIS DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL

Salah satu penyebab utama kegagalan pendidikan nasional sebagai perekat kohesi sosial untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat hidup secara damai di negaranya sendiri karena kekeliruan memilih paradigma pembangunan nasional masa lampau yang berpijak pada *unity in uniformity* (Abbas, 2003:65). Konsep pembangunan menekankan keseragaman dan persatuan dalam bentuk kesamaan pada seluruh sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Pembangunan diarahkan pada sistem sentralisasi, termasuk dalam pendidikan ditekankan pada penyeragaman besar-besaran, mulai dari kurikulum materi dan buku-buku sumber belajar yang digunakan meskipun peserta didik memiliki latar belakang budaya, lingkungan sosial dan alam yang bervariasi.

Paradigma pembangunan dengan keharusan penyeragaman (*uniformity*) selama ber-puluh-puluh tahun setelah memasuki era reformasi seperti terlepas dari suatu belunggu besar yang mengikat. Keanekaragaman dan kemajemukan budaya, adat istiadat, kehidupan sosial mulai ditampilkan dan akibat dari euforia yang berlebihan itu berdampak adanya gesekan-gesekan sosial dan merupakan bibit unggul untuk melahirkan konflik sosial jika tidak dikelola dan disikapi secara arif dan bijaksana sebagai suatu keniscayaan dari sebuah masyarakat yang majemuk.

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan pendidikan pada masa sekarang harus berpijak pada pluralisme kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan harus diarahkan

untuk menghargai potensi-potensi budaya lokal agar bisa tumbuh, dan kebhinekaan tetap berada dalam bingkai ke-Indonesiaan yang bersatu, tetapi tetap beragam, dan beragam namun dalam keutuhan (Abbas, 2003:67). Pengembangan pendidikan dengan memperhatikan potensi sosial budaya masyarakat adalah bentuk pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, bersifat demokratis, mengakui persamaan derajat manusia dalam keragaman yang berbeda (Nizar dan Saifuddin, 2010:49).

Tidak boleh terjadi suatu komunitas yang sedang dilanda krisis kesejahteraan (konflik) seperti yang terjadi pada beberapa tempat dan daerah di Indonesia. Misalnya, negara atau oknum aparat justru sibuk mencari celah-celah untuk menindas rakyat yang sudah “sekarat” kemampuan pendapatannya melalui sejumlah produk kebijakan represif yang tidak populer, baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat atau berkarakter mendehumanisasikan manusia Indonesia (Muchsin, 2010:141). Reformasi dan transformasi pendidikan dari pendidikan dan perilaku otoritatif kepada pendidikan yang humanis dengan mengakui karakteristik dan latar belakang sosial budaya peserta didik adalah bagian upaya mencapai cita-cita *education for all* secara adil dan berkelanjutan (Muchsin, 2010: 51).

Pendidikan humanis menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan, yaitu pengakuan terhadap hak dasar, keragaman dan potensi yang dimiliki serta didasarkan atas keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai positif dalam dirinya sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Riyanto menekankan pendidikan humanis adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dan antarpribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah (Riyanto, 2002:20). Pendidikan yang baik tidak sekedar mengasah kecerdasan intelektual semata, tetapi juga menyelaraskan kecerdasan emosional, sosial dan spiritual sehingga memberi keseimbangan pada diri anak dari aspek individualitas kepada aspek sosialitas

atau kepekaan dalam kehidupan bersama sebagai suatu sistem masyarakat.

Oleh karena itu, Spranger menekankan bahwa manusia akan menjadi sungguh-sungguh manusia jika ia mengembangkan nilai-nilai rohani (nilai-nilai budaya) yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan politik (Riyanto, 2002:10). Naluri dasar manusia sesungguhnya adalah setiap manusia ingin diperlakukan secara manusiawi. Keharusan itu diwujudkan dalam komitmen kemanusiaan kepada budaya tanpa kekerasan dan budaya yang menghargai hidup, budaya solidaritas dan tata cara ekonomi yang adil, budaya toleransi dan hidup yang benar, serta budaya kesamaan hak dan komitmen laki-laki dengan perempuan (Ngeljaratan, 2004:85).

Menurut Barnadib, konsep dasar pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan nasional yang humanis, pendidikan yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki daya cipta, karsa dan karya dan mengembangkan semua daya secara seimbang tanpa menitikberatkan pada satu daya saja. Jika itu yang dilakukan, akan terbentuk manusia yang kurang humanis atau manusiawi (Barnadib, 1998:38-39). Taman Siswa tidak memisahkan diri dengan masyarakat luas, ia harus menghubungkan diri dengan masyarakat di sekitarnya kalau ingin mengabdikan pada kepentingan masyarakat semurni-murninya. Filosofi dan tujuan dasar didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro adalah ingin mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang hidup dan mengakar dalam masyarakat. Artinya, pendidikan yang sesungguhnya dalam konsep awal pembangunan pendidikan nasional adalah (1) sebagai proses pewarisan, penerusan atau enkulturasi, dan sosialisasi perilaku sosial yang telah menjadi model anutan masyarakat lingkungannya secara baku; (2) sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh anak yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka pada suatu zaman dan tempat mereka harus *survival* (Tilaar, 2005:117).

Beberapa uraian yang dikemukakan di atas tampak bahwa kalangan tokoh-tokoh perintis dan peletak dasar pembangunan bangsa, khususnya pembangunan bidang pendidikan telah menempatkan muara pendidikan nasional yang akan dibangun selaras dengan filosofi dasar masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur, budaya, adat istiadat dan agama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya nilai-nilai dasar pengembangan pendidikan itu mulai tereliminir akibat pengaruh budaya-budaya luar yang tidak searah dengan semangat nilai-nilai sosial budaya dan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, konsep dasar pendidikan nasional yang mengakar pada nilai sosial dan budaya sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yang majemuk perlu diper tegas kembali sebagai solusi terjadinya gesekan-gesekan sosial yang berpotensi melahirkan konflik dengan mengembangkan pendidikan multikultural dan pendidikan karakter bangsa.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang mempraktikkan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik/orang lain, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama dan budaya (Hasyim dan Hartono, 2009: 28). Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku (*mode of action*) peserta didik terhadap keragaman agama, budaya dan masyarakat (Arif, 2010:192). Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk memberikan persamaan hak di tengah keragaman masyarakat, seperti hak berekspresi, menyatakan pendapat, berkelompok, dan hak-hak dalam sosial budaya, termasuk hak mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*). Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial (Imron, 2009:50).

Konsep pendidikan multikultural menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi se-

mua orang yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran se-efektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik yang diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Secara global, pendidikan multikultural telah direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO pada tahun 1994 yang dinyatakan sebagai berikut. (1) Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerjasama dengan yang lain. (2) Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. (3) Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan (Poli,2004:146-147).

Dalam konteks Indonesia, gagasan multikultural muncul setelah rezim orde baru jatuh dan puncaknya ketika K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden Republik Indonesia. Gusdur secara nyata memberi ruang yang luas untuk mengakui semua hak-hak dasar dan sosial budaya rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mengakui keberadaan budaya dan keyakinan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Konsep multikultural kemudian diharapkan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah mengembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari

ajaran masing-masing agama (Mudzhar, 2004: 18-19).

Konsep multikultural yang mengedepankan persamaan dan kesetaraan hak dalam perbedaan mendorong lembaga pendidikan untuk mengaplikasikan secara sistematis dan terencana dalam pretek pendidikan sebab dengan paradigma pendidikan multikultural akan mampu membangun kohesifitas, solidaritas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama dan budaya. Artinya, nilai-nilai multikultural jika ditanamkan sejak dini kepada anak akan membantu mereka untuk mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Pemahaman nilai-nilai multikultural yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya gesekan-gesekan antarpribadi maupun antarkelompok sosial yang dapat mengarah kepada konflik sosial. Dengan demikian, setiap orang akan menyadari bahwa manusia dilahirkan memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, suku, dan agama yang berbeda. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dan merupakan *sunatullah*, hukum alam yang harus diterima setiap orang. Dengan demikian, akan muncul rasa penghargaan dan perlakuan antar-sesama secara manusiawi, yaitu suatu model perlakuan dan interaksi yang selalu dipandang dari sisi dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism values*).

Beberapa tawaran pendekatan yang dapat dipakai dalam praktik pendidikan multikultural sebagai bentuk perwujudan pendidikan yang humanis antara lain sebagai berikut. (1) Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang berbeda secara kultural dilakukan dengan menitikberatkan agar dapat terjadi perubahan kultural yang damai. (2) Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan dan mendorong peserta didik memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. (3) Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. (4) Pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antarke-

lompok. (5) Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial (Munib, 2009:30).

Peran pendidikan multikultural akan menciptakan kesadaran pluralitas agama dan budaya dengan menumbuhkan perasaan berbagi kemanusiaan dengan orang-orang yang secara fundamental berbeda orientasi ideologinya sehingga pendidikan multikultural diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan terjadinya disharmoni di dalam masyarakat. Keharusan untuk berbagi itu membuat kita untuk memikirkan kembali alat-alat kultural dan sosial agar mampu bertahan (*survive*) dengan perdamaian, kebebasan, dan martabat kemanusiaan. Manusia dilarang mengemas atau memperlakukan dirinya sebagai penyakit di masyarakat yang mengakibatkan adanya hal-hak sesama manusia menjadi korban.

PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter merupakan salah satu pola pendidikan yang dapat mewujudkan konsep pendidikan yang humanis, yaitu pendidikan yang mengembangkan potensi hati nurani, kejujuran, cinta kasih, sopan santun, amanah, dan kemandirian (Muchsin, 2010:145). Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyiapkan generasi unggul yang sanggup bersaing dengan sumber daya manusia bangsa lain, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, budaya, dan moral agama. Orang yang kehilangan karakter akan menjadi orang-orang yang tidak mempunyai harga diri dan tidak memiliki keberanian, kehilangan sifat dan sikap patriotisme, dan tidak sanggup menyampaikan kebenaran (Hasan, 1996:43). Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional berharap agar pendidikan dapat mengembangkan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan tubuh anak (Barnadib, 1998:90).

Para pendiri bangsa Indonesia sepakat bahwa membangun jati diri atau membangun

karakter bangsa harus dilakukan secara berkesinambungan dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam pendidikan karakter melibatkan pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas intelektualnya sekaligus emosi dan spritualnya. Kecerdasan-kecerdasan ini menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi muda menyongsong masa depan sehingga lebih mudah dan berhasil menghadapi segala bentuk tantangan kehidupan yang lebih kompleks. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depag RI, 2003:37).

Rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menggambarkan bahwa lima dari delapan potensi peserta didik yang harus dikembangkan dalam pendidikan sangat dekat dengan pembangunan karakter anak. Sebenarnya, nilai-nilai karakter yang hendak dibangun di atas sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai yang hakikatnya gali dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Oleh karena itu, menurut Tilaar pendidikan karakter Indonesia semestinya mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang mempersatukan Indonesia sehingga akan menjadi karakter yang khas bangsa Indonesia yang hidup dalam budaya multikultural (Tilaar, 2005:125).

Nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama harus dibangun dan dimulai dari rumah tangga dan keluarga sebagai lembaga pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama, kemudian diteruskan dengan pendidikan di sekolah (pendidikan formal) dan di masyarakat (nonformal). Pendidikan karakter

di sekolah penekanannya tidak hanya pada aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi yang lebih penting adalah penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti luhur, dan sebagainya, baik dilakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Penanaman nilai-nilai di lingkungan masyarakat juga menjadi domain penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter karena masyarakat memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanaman nilai-nilai etika dan estetika dalam membentuk karakter.

Oleh karena itu, efektivitas pendidikan karakter akan terwujud jika ada sinergitas dan keterpaduan ketiga unsur di atas (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Menurut Megawangi, setidaknya terdapat sembilan pilar sebagai bentuk nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan, yaitu: (a) cinta pada Tuhan dan kebenaran; (b) tanggung jawab; kedisiplinan dan kemandirian; (c) amanah; (d) hormat dan santun; (e) kasih sayang; kepedulian dan kerjasama; (f) Percaya diri; kreatif dan pantang menyerah; (g) keadilan dan kepemimpinan; (h) baik dan rendah hati; dan (i) toleransi dan cinta damai (Megawangi, 1999:70).

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sebagai berikut. (1) Desain berbasis kelas, berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar. (2) Desain berbasis kultural sekolah, yang berusaha membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai-nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri peserta didik. (3) Desain berbasis komunitas, artinya komunitas sekolah tidak berjuang sendiri, tetapi masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka (Sirajudin, 2012:2).

Beberapa nilai-nilai dan konsep dasar pendidikan karakter yang dikemukakan di atas jika terimplementasi dengan baik akan melahirkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional, sosial, dan spritual. Wujud dari integrasi empat kecerdasan akan membentuk suatu pola sikap dan perilaku yang memiliki empati, arif, dan bijaksana serta bertanggung jawab, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, diyakini bahwa salah satu solusi nyata bagi konflik sosial dan disharmonisasi yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan mengembangkan pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter akan menumbuhkembangkan sikap empati, jujur, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan manusia lain sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki kodrat dan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi berdasarkan harkat dan martabatnya secara manusiawi.

PENUTUP

Islam adalah agama yang memiliki konsep perdamaian dan mengedepankan dinamisasi pemeluknya dalam menghadapi kehidupan. Islam sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan sosial masyarakat. Hal itu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw ketika Beliau memimpin negara di Madinah. Oleh karena itu, berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia, umat Islam mestinya memiliki konsep dan resolusi yang jelas sebagai perwujudan Islam yang damai.

Selain itu, realitas kemajemukan masyarakat Indonesia yang sering menimbulkan konflik sosial mengindikasikan kalau peran pendidikan belum maksimal dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan dan keragaman sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan, dari paradigma monokultural kepada paradigma multikultural serta dari model pendidikan otoritatif kepada pendidikan yang humanis. Pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang mengembangkan keragaman dan toleransi serta pendidikan yang menumbuh kembangkan berbagai potensi dan karakter dasar manusia seperti kejujuran, keadilan, sopan santun baik yang bersumber dari nilai-nilai bu-

daya, adat istiadat maupun agama di atas prinsip-prinsip kemajemukan dan pluralitas sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada sejawat yang telah membantu penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik lewat dialog, sumbang saran pemikiran, maupun berbagai aktivitas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A. Maftuh. 2004. *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: Sr-Ins Publishing.
- Abbas, Hafid. 2003. *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Muhammad. 2010. *Arti Penting Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural*. Yogyakarta: UIN-Press.
- Baidowi, Ahmad. 2006. *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: UIN Press.
- Barnadib, Imam. 1998. *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Agama RI. 1982. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran.
- Departemen Agama RI. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam.
- El-Fadl, Khaled M. 2003. *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terjemahan Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Haekal, Muhammad Husein, Hayat al Muhammad. Terjemahan Ali Auda 1990. *Sejarah Hidup Muhammad*. Cet II. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

- Hanafi, Hasan. 2002. *Agama Kekerasan dan Islam Kontemporer*. terjemahan Ahmad Najib Yogyakarta: Jendela.
- Hasan, Muhammad Tolchah. 1996. *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Bangun Prakarya.
- Hasyim, A. Dardi, dan Yudi Hartono. 2009. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta: UNS-Press.
- Imron, Mushadi. 2009. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama.
- Mudzhar, M. Atho. 2004. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Depag.
- Munib, Achmad. 2009. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UNNES-Press.
- Muchsin, Bashori. at. all. 2010. *Pendidikan Islam Humanistik; Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Mebiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Najib, Agus Moh. 2011. "Hubungan Antar Agama" dalam *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*. Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN.
- Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin. 2010. *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ngeljaratan, Ishak. 2004. "Artikulasi Nilai Keadilan Melalui Sikap dan Perilaku Budaya", dalam Hamka Haq (ed) *Damai; Ajaran Semua Agama*. Makassar: Al-Ahkam.
- Poli, W.I.M. 2004. *Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik*. Makassar: Ahkam.
- Riyanto, Theo. 2002. *Pembelajaran sebagai Pembimbingan Pribadi*. Jakarta: Grasindo.
- Sopamena, Daniel. 2007. "Mendefinisikan Indonesia; Politik Identitas dalam Koridor Demokrasi Perspektif Komunitas Agama". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional tanggal 26 Desember 2007, di Aula PPS UIN Alauddin Makassar.
- Sewang, Ahmad M. 2004. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya ,Mengatasi Konflik Sosial", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional, STAIN Datokarama Palu, tgl 20 Desember 2004.
- Sirajuddin, Nursalam. 2012. "Mereorientasi Pendidikan Karakter Indonesia", <http://metronews.co.id/read/91257/19> (Diunduh tanggal 31 Agustus 2012).
- Taher, Lukman S. 2009. *Damai untuk Kemanusiaan, Strategi dan Model Komunikasi Antara Umat Beragama di Sulawesi Tengah*, Palu: USAID-FKUB Sulteng.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Post-modernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Penerbit Kompas.